



SOLIDARITAS **YANG MEMERDEKAKAN**

**Refleksi Atas Peran dan Tantangan
Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi**



Monica E. Madyaningrum

SOLIDARITAS YANG MEMERDEKAKAN:

**Refleksi atas Peran dan Tantangan Pendidikan Tinggi
di Masa Pandemi**

Monica E. Madyaningrum



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS

SOLIDARITAS YANG MEMERDEKAKAN:

Refleksi atas Peran dan Tantangan Pendidikan Tinggi
di Masa Pandemi

Copyright © 2020

Monica E. Madyaningrum, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

Penulis:

Monica E. Madyaningrum

Buku cetak:

ISBN: 978-623-7379-80-5

EAN: 9-786237-379805

Bidang psikologi

Cetakan Pertama, 2020

54 hlm.; 14,8 x 21 cm.

Ilustrasi sampul & tata letak:

Thoms

PENERBIT:



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS

Lantai 1 Gedung Perpustakaan USD

Jl. Affandi (Gejayan) Mrican,

Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 513301, 515253;

Ext.1527/1513; Fax (0274) 562383

e-mail: publisher@usd.ac.id

INSTITUSI PENDUKUNG & PENYELENGGARA:



PIDATO PUNCAK DIES NATALIS KE-65

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Wakil Rektor I, Kampus II Mrican,

Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 513301, 515253;



Sanata Dharma University Press anggota APPTI

(Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

No. Anggota APPTI: 003.028.1.03.2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi buku sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Daftar Isi

DAFTAR ISI	3
PENGANTAR	
BERMULA DARI YANG SEHARI-HARI	5
1. PANDEMI SEBAGAI PESAN JAMAN	11
Pandemi dan Ketidakadilan	11
Pandemi dan Ketidaksetaraan	16
Pandemi dan Teknikalisasi Persoalan	20
2. PENDIDIKAN TINGGI BERKACA PADA PANDEMI	25
Keadilan dan Kesetaraan sebagai Orientasi Etik	26
Komitmen pada Praktek Baik	30
3. PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI RUANG FORMASI DAN IKHTIAR ETIS	33
4. PENUTUP: SOLIDARITAS YANG MEMERDEKAKAN	41
DAFTAR PUSTAKA	45
TENTANG PENULIS	53

Pengantar

Bermula dari yang Sehari-Hari

Everyone wants to do a revolution, but no one wants to do the dishes (unknown)

Satu dekade yang lalu, ada sebuah film dokumenter berjudul *'waiting for superman'* (2010) yang memotret sistem dan praktek pendidikan menengah di Amerika Serikat. Semacam jurnalisme investigasi, film ini melaporkan berbagai macam kekacauan yang terjadi di sekolah-sekolah publik di negara ini. Dalam film ini, memburuknya tata kelola dan kualitas pendidikan tidak pertama-tama disorot dari berbagai data makro yang biasa digunakan untuk menilai dan membandingkan mutu pendidikan di dan antar berbagai negara, seperti misalnya peringkat PISA (*The Programme for International Student Assessment*). Film ini justru mengungkapkannya melalui potret detail keseharian para murid dan guru, seperti bagaimana para murid berjuang mendapatkan tempat di sekolahnya dan bagaimana para guru menjalankan rutinitasnya.

Masih dari Amerika Serikat, di tahun 2015, muncul film dokumenter berjudul *'where to invade next'*. Film ini merupakan potret satir atas berbagai ilusi kedigdayaan Amerika Serikat termasuk dalam sistem dan praktek pendidikan dasar dan menengahnya. Sama seperti yang dijumpai dalam film *'waiting for superman'*, untuk menunjukkan betapa jauh lebih berkualitas pendidikan dasar dan menengah di sejumlah negara di Eropa dibanding di Amerika Serikat, sutradara film ini tidak pertama-

tama melihatnya dari berbagai data makro di tingkat nasional maupun global. Keseharian di sekolah-sekolah menjadi fokus utama liputan film ini. Untuk menunjukkan keunggulan praktek pendidikan dasar di Prancis dan Finlandia misalnya, film ini menyorotinya dari keseriusan sekolah-sekolah di kedua negara tersebut dalam mengelola menu makan siang gratis dan arena rekreasi. Setiap bulan, kepala juru masak di sekolah – sekolah harus mempresentasikan rencana menu makan siang di hadapan para wakil rakyat di dewan kota.

Dari detail keseharian pulalah, dalam buku berjudul '*young heroes*', antropolog Saya Shiraishi (1997), bisa dengan tajam memotret bagaimana sekolah dasar dan menengah di masa Orde Baru di negara kita lebih berfungsi sebagai institusi penertiban dan penundukan daripada sebagai lembaga pendidikan. Melalui amatannya atas apa yang terjadi di ruang-ruang kelas, Shiraishi dengan jeli memotret bagaimana politik 'aman dan terkendali' ala Orde Baru mewujud dalam pengalaman yang membadan pada para murid, sebagaimana tercermin dalam sikap tubuh yang begitu seragam dan 'tertib'.

Belajar dari contoh-contoh semacam inilah, penulis mencoba menyusun naskah ini. Catatan sederhana ini mencoba melihat yang renik dan sehari-hari, bukan sekedar sebagai peristiwa dan pengalaman yang isolatif, melainkan sebagai pantulan dari apa yang telah dan tengah terjadi secara lebih sistemik dalam ekosistem kita. Tulisan ini mencoba merefleksikan apa yang menjadi bagian dari keseharian kita di Sanata Dharma, sebagai cermin untuk merenungkan tantangan dan harapan pada pendidikan tinggi di masa pandemi ini.

Sebagai pendidik pemula, tentu bukan kapasitas penulis untuk memaksudkan catatan ini sebagai sebuah orasi akademis

yang bisa dengan detail dan luas memproyeksikan arah dan gerak pendidikan tinggi, dan Sanata Dharma pada khususnya. Dengan sejarah panjangnya sebagai sebuah institusi pendidikan dan keguruan, universitas kita memiliki pedagog-pedagog ulung yang mumpuni untuk melakukan peran tersebut. Kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan catatan ini barangkali lebih mencerminkan komitmen Sanata Dharma untuk membina angkatan muda. Maka dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan catatan sederhana atas apa yang menjadi harapan dan juga kekhawatiran, semangat dan juga kegelisahan dari proses menjalani dan memaknai keseharian di universitas kita bersama ini. Barangkali catatan sederhana ini bisa menjadi semacam cermin kecil untuk melihat formasi ideologis ataupun pedagogis semacam apa yang kami perlukan sebagai pendidik-pendidik pemula, agar semakin mampu menghidupi mimpi besar Driyarkara tentang memanusiakan manusia. Maka, penulis sungguh berterima kasih kepada Rektor Universitas Sanata Dharma, Bapak Drs. J. Eka Priyatna, M.Sc., PhD., dan segenap panitia Dies Natalis ke-65 atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan.

Dalam semangat ini, tulisan ini hendak melihat dunia pendidikan tinggi, bukan pertama-tama dari paradigma pedagogis tertentu. Tulisan ini akan lebih banyak memanfaatkan amatan sederhana atas apa yang sehari-hari dilihat dan dialami di universitas ini, baik dalam posisi penulis sebagai pembelajar, pengajar, peneliti maupun sebagai pegawai dengan segala relik dan rumpil tata kelola administrasi yang menyertainya. Ada dua hal yang mendorong mengapa pendekatan ini yang digunakan. Pertama, pada kenyataannya tulisan ini disusun oleh seseorang yang selama tiga tahun terakhir, kerja dan karya profesionalnya lebih banyak diwarnai dengan berbagai urusan yang sangat

domestik. Hal-hal seperti menyusun jadwal kuliah, menagih soal ujian, mengingatkan kolega yang terlambat menyerahkan nilai akhir mahasiswa atau mengelola *complaint* mahasiswa atas ini dan itu. Menteri pendidikan bisa berganti, pun paradigma pendidikan bisa direvolusi, namun pada kenyataannya dalam rutin domestik semacam itulah nadi keseharian sebuah universitas berdetak. Rutinitas seperti ini yang menjadi semacam '*the real battleground*' untuk melihat integrasi, kontestasi ataupun kompromi dari berbagai idealisme, paradigma pendidikan dan kepentingan. Mencermati yang sehari-hari juga menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana berbagai ironi dan paradoks yang ada di dunia pendidikan tinggi tampil sebagai pengalaman yang dekat dan bahkan membadan, sebagaimana suatu hari seorang kolega *ngudo roso*, "sejak pandemi ini dan harus mengajar dengan serba daring, sekarang hampir setiap hari harus minum obat sakit kepala"

Kedua, melihat yang sehari-hari sebagai cermin dari sistem dan konteks yang lebih besar merupakan semangat dasar dari psikologi komunitas, bidang kajian yang penulis tekuni. Sejalan dengan ilmu induknya, psikologi komunitas juga merupakan bidang studi yang bertujuan untuk memahami manusia dengan berbagai pelik dan rumitnya. Hanya saja, kalau psikologi tradisional cenderung memusatkan perhatian pada faktor dan determinan personal, psikologi komunitas lebih tertarik untuk memahami manusia dari sudut pandang konteks sosio-ekologis yang melingkupinya. Didasari oleh asumsi semacam inilah, maka tulisan ini hendak menggunakan apa yang ada dalam keseharian kita untuk membaca sistem dan konteks yang lebih besar yang membentuk pengalaman-pengalaman kita di masa pandemi ini,

dan berbagai kemungkinan implikasinya bagi kita yang berkarya di dunia pendidikan tinggi.

Secara lebih spesifik ada tiga ruang keseharian yang coba didialogkan dan direfleksikan dalam naskah ini. Pertama adalah keseharian sebagai pengajar di Universitas Sanata Dharma. Ruang kedua adalah pengalaman dan pembelajaran yang dijumpai melalui keterlibatan penulis dalam dunia aktivisme disabilitas. Ketiga, penulis juga akan menyertakan dalam naskah ini apa yang penulis pelajari dari para pemikir dan aktivis di area psikologi komunitas. Barangkali bukan sepenuhnya kebetulan bahwa berbagai pemikiran dan praxis yang membangun bidang ini terutama muncul dan berkembang di Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin, yang merupakan wilayah-wilayah dengan sejarah panjang perjuangan melawan kolonisasi, rezim yang opresif dan oligarki yang eksploitatif.

Melalui ketiga hal di atas, tulisan ini hendak merefleksikan apa yang sedang menjadi pengalaman dan pergulatan kita bersama di masa pandemi ini, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Ada tiga gagasan pokok yang hendak dipaparkan dalam tulisan ini. Pertama, menggunakan perspektif psikologi komunitas, tulisan ini mencoba menelaah pandemi sebagai epitome dari persoalan yang lebih besar terkait keadilan, kesetaraan dan keberpihakan. Berangkat dari telaah ini, di bagian kedua dari naskah, penulis mencoba melihat bagaimana dunia pendidikan tinggi bisa berkaca dan belajar dari situasi pandemi saat ini. Dalam mendiskusikan berbagai kemungkinan pembelajaran yang bisa ditarik dari situasi ini, penulis terutama akan mengaitkannya dengan tanggung jawab publik universitas dan perannya sebagai sebuah ruang formasi. Hal inilah yang menjadi poin diskusi utama di bagian ketiga dari tulisan ini. Terakhir, sebagai penutup, penulis

akan merefleksikan ketiga gagasan ini dalam kaitannya dengan apa yang tengah menjadi konteks utama dunia pendidikan tinggi di negara kita, khususnya terkait wacana kampus merdeka, merdeka belajar. Kemerdekaan dalam tulisan ini lebih dilihat sebagai kesempatan dan kehendak untuk terus mengolah cara kita memaknai dan menghidupi solidaritas, yang merupakan titian penting untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang semakin memanusiakan manusia.

1.

Pandemi sebagai Pesan Jaman

“Of all the forms of inequality, injustice in health care is the most shocking and inhumane” (Martin Luther King Jr)

Refleksi utama yang ingin dibangun dalam tulisan ini adalah bagaimana menggunakan pengalaman dan situasi yang kita hadapi di masa pandemi sebagai momentum untuk membaca harapan dan tantangan seperti apa yang relevan untuk disikapi oleh dunia pendidikan tinggi. Mengawali proses refleksi tersebut, penulis akan terlebih dahulu memaparkan hal-hal apa yang penulis pandang sebagai pesan sosial utama yang tersampaikan melalui pandemi ini. Pesan-pesan sosial inilah yang akan menjadi titik pijak bagi penulis untuk merumuskan poin-poin refleksi tentang pandemi dan implikasinya bagi kita yang berkarya di dunia pendidikan tinggi. Secara khusus di bagian pertama ini, penulis akan menyoroti persoalan ketidakadilan, ketidaksetaraan dan teknikalisis persoalan sebagai pesan-pesan sosial utama yang bisa ditarik dari situasi pandemi.

Pandemi dan Ketidakadilan

Laksana pukut harimau, pandemi COVID 19 mengangkat ke permukaan beragam persoalan laten yang selama ini seolah terbenam dalam lautan keseharian kita. Pandemi ini menjadi semacam kaca pembesar untuk melihat dengan lebih jelas permasalahan-permasalahan kronik di sekitar kita, mulai dari

kacaunya sistem dan layanan kesehatan publik di negara ini, tidak meratanya akses pada fasilitas dan layanan pendidikan, hingga di tingkat yang sangat personal, kerentanan relasi dalam keluarga sebagaimana tercermin dalam laporan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (2020), tentang kenaikan angka kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi ini. Dari berbagai permasalahan yang terekspos dengan lebih jelas karena adanya pandemi ini, bisa jadi wajah ketidakadilan merupakan persoalan yang paling mencolok.

Sebagaimana tercermin dalam sejumlah analisa awal atas pandemi COVID 19 (e.g., Burström & Tao, 2020; Cénat, Dalexis, Kokou-Kpolou, Mukunzi, & Rousseau, 2020; Marmot & Allen, 2020), kita bisa dengan mudah menemukan beragam data yang menunjukkan bagaimana wabah ini semakin menegaskan kesenjangan antara *the privileged minorities* dan mayoritas orang yang hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses pada layanan kesehatan, pendidikan dan jaminan atas penghidupan yang layak. Lembaga dunia untuk isu ketenagakerjaan, the *International Labour Organization* misalnya, memberikan estimasi bahwa 1,6 milyar pekerja sektor informal atau setara dengan separuh dari total tenaga kerja global, beresiko untuk kehilangan pekerjaannya akibat pandemi (International Labour Organization, 2020). Di sisi lain, dilaporkan bahwa hanya dalam kuartal pertama tahun 2020, kekayaan para miliader dunia justru mengalami peningkatan sebanyak 2,2 triliun dollar Amerika (Read, 2020). Situasi semacam inilah yang menunjukkan relevansi dari rumusan '*disaster means different things to different people*' yang merupakan asumsi utama dalam diskursus akademis tentang mitigasi dan penanganan bencana (Britton, 1986, hlm. 257).

Benar bahwa bencana tidak pernah merupakan hal yang sama bagi setiap orang, dan tampaknya dari pandemi ini kita belajar bahwa faktor keadilan dan ketidakadilanlah yang menjadi pembedanya. Faktor ini juga yang tampaknya menjadi penentu seberapa cepat atau lambat kita bisa mengatasi pukulan beruntun yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Di bulan Juni 2020, *Time* melaporkan negara-negara berikut sebagai negara yang relatif paling baik dalam menangani pandemi COVID 19: Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, Kanada, Jerman, Islandia, Uni Emirat Arab, Yunani dan Argentina (Bremmer, 2020). Dalam wacana keseharian masyarakat kita, keberhasilan negara-negara ini bisa jadi akan dengan segera dikaitkan dengan asumsi-asumsi klasik tentang kualitas kepemimpinan di negara tersebut, karakteristik penduduknya yang mudah diatur atau jumlah penduduknya yang sedikit sehingga lebih mudah dikendalikan. Kesigapan para petinggi negara dan kedisiplinan masyarakat memang merupakan determinan penting, namun demikian semata-mata mengandalkan penjelasan semacam ini bisa jadi membuat kita abai pada peran faktor lain yang tak kalah menentukan, yaitu persoalan keadilan dan ketidakadilan.

Barangkali bukan sebuah kebetulan semata kalau menurut laporan Oxfam tahun 2018 negara-negara di atas merupakan negara-negara dengan ranking tinggi untuk komitmennya pada upaya mengatasi kesenjangan, sebagaimana diukur dari 3 indikator yaitu alokasi anggaran untuk layanan publik, pemberlakuan pajak progresif dan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja (Oxfam, 2018). Apabila dilihat dari tingkat pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita, negara-negara ini berada di tingkat yang relatif sama dengan negara-negara lain dalam kategorinya, yang dipandang kurang atau belum berhasil

mengatasi pandemi. Menurut data Bank Dunia tahun 2019, dibanding Amerika Serikat misalnya, Selandia Baru justru memiliki PDB per kapita yang lebih rendah (World Bank national accounts data, 2020). Amatan semacam inilah yang menunjukkan bahwa besarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara bukanlah penentu utama ketangguhannya menghadapi bencana. Jauh lebih penting adalah bagaimana negara-negara tersebut mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Pada titik inilah keadilan dan ketidakadilan menjadi determinan penting. Melalui cara negara mengalokasikan sumber daya akan terlihat sejauh mana ada komitmen publik untuk memastikan bahwa akses pada kualitas kehidupan yang layak bukan hanya menjadi milik dari *the privileged minorities* melainkan terlebih-lebih menjadi hal yang bisa dicapai oleh kelompok-kelompok yang paling rentan di negara tersebut (Pickett & Wilkinson, 2010; Wilkinson & Pickett, 2009).

Jauh sebelum pandemi, keterkaitan antara komitmen pada keadilan dan kualitas kehidupan suatu masyarakat telah lama menjadi argumen pokok dari para epidemiolog (e.g., Ansell, 2017; Pickett & Wilkinson, 2010; Wilkinson & Pickett, 2009). Melalui studi-studi longitudinal, para ahli kesehatan masyarakat ini menunjukkan bagaimana komitmen pada keadilan menjadi semacam '*password*' bagi hadirnya kebijakan dan keputusan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara merata, mulai dari jaminan kesehatan, akses pada pendidikan dan kesempatan untuk memiliki mata pencaharian yang layak. Adanya orientasi publik semacam ini, memperbesar kemungkinan bahwa alokasi sumber daya suatu negara akan diprioritaskan untuk hal-hal yang memiliki peran kunci bagi kemampuan setiap warga negaranya memiliki kehidupan yang layak: asuransi kesehatan, jaminan sosial, dana pendidikan,

jaminan keselamatan kerja dan lain sebagainya (Oxfam International, 2014). Maka tidak mengherankan, bahwa negara-negara yang dipandang berhasil mengatasi pandemi dengan relatif cepat, adalah negara-negara yang memiliki rapot yang cemerlang untuk orientasi publik semacam ini. Komitmen pada keadilan yang telah diterjemahkan secara sistemik dan berkelanjutan, memberi kemungkinan yang lebih besar bagi negara-negara ini maupun masing-masing warganya untuk memiliki '*air bag*' berlapis ketika dihantam oleh badai pandemi. Sebaliknya, seperti bisa kita lihat dari situasi di negara kita sendiri, minimnya keadilan, berarti juga minimnya (atau bahkan seringkali tidak adanya) bentuk-bentuk proteksi publik yang memungkinkan masyarakat kita bertahan dengan lebih baik di situasi pandemi ini.

Dari berbagai implikasi yang bisa ditarik dari amatan ini, penulis terutama ingin menyoroti dua hal. Pertama, pandemi ini menegaskan bahwa ikhtiar untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat mensyaratkan kesediaan untuk terlibat dalam upaya-upaya mengatasi persoalan keadilan dan ketidakadilan. Kedua, amatan ini menegaskan bahwa persoalan-persoalan besar yang muncul di masa pandemi ini, lebih banyak terkait dengan hal-hal yang memang telah menjadi persoalan kronik jauh sebelum pandemi itu sendiri terjadi. Berangkat dari kesadaran ini, maka dalam ikhtiar kita untuk merespon berbagai tantangan yang muncul di masa pandemi ini tampaknya perlu untuk memfokuskan perhatian kita pada bagaimana kita mengelola kehidupan publik kita sebelum pandemi, dan tidak semata-mata berpusat pada apa yang terjadi setelah pandemi. Dengan kata lain, tampaknya pandemi ini mengajak kita untuk melihat bahwa berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh wabah ini bisa jadi lebih merupakan harga yang harus dibayarkan

dari apa yang kita lakukan sebelum pandemi daripada sebagai sesuatu yang disebabkan oleh pandemi itu sendiri.

Bagi kita yang bekerja di konteks pendidikan tinggi, barangkali pesan ini menjadi undangan supaya kita tidak semata-mata memfokuskan perhatian pada bagaimana kita mesti merumuskan pendidikan tinggi di era ‘normal baru’. Kemampuan kita untuk memahami dan mensiasati situasi paska pandemi, tampaknya juga mensyaratkan kesediaan untuk melihat ke belakang, model dan praktek pendidikan semacam apa yang menjadi orientasi kita sebelum terjadinya pandemi. Melalui refleksi semacam ini, barangkali kita akan terbantu untuk mengenali dengan lebih baik bagian-bagian mana dari model dan praktek pendidikan yang kita hidupi selama ini yang memberi kita daya lenting dihadapan pandemi, atau sebaliknya yang justru merentakan kapasitas kelembagaan kita, maupun kapasitas personal kita, sebagai orang-orang yang ‘menitipkan’ kehidupan di institusi ini, entah sebagai mahasiswa ataupun pegawai.

Pandemi dan Ketidaksetaraan

Bukan hanya menjadi kaca pembesar bagi beragam persoalan di masyarakat kita, tampaknya pandemi juga menegaskan apa yang sejak beberapa tahun belakangan ini didengungkan sebagai karakteristik utama dari masyarakat kontemporer, yaitu dunia yang *volatile, uncertain, complex* dan *ambiguous* (VUCA) (e.g., Bennett & Lemoine, 2014; Korsakova, 2019). Menjadi motor dari dunia semacam ini adalah apa yang dimantrakan sebagai revolusi 4.0 yang seringkali diasosiasikan dengan segala sesuatu yang menjadi lebih cepat dan lebih segera karena *platform* dan teknologi digital yang memungkinkannya. Tidak mengherankan karenanya kalau masyarakat kita dikatakan

sedang berubah secara eksponensial (Bennett & Lemoine, 2014; Korsakova, 2019). Kesan bahwa kita sedang berada dalam pusaran perubahan yang sangat cepat barangkali menjadi lebih terasa di masa pandemi ini. Bagi kita di dunia pendidikan, kesan semacam ini kita rasakan dari bagaimana hanya dalam hitungan minggu kita harus bermigrasi sepenuhnya ke dalam model pembelajaran daring.

Situasi semacam inilah yang bisa jadi memberikan ilusi tentang betapa cepatnya dan betapa jauhnya masyarakat kita sedang dan telah berubah. Namun demikian, bagi sebagian dari kita, tampaknya pandemi ini justru menjadi pengingat betapa masyarakat kita sebenarnya jalan di tempat. Perjumpaan dengan sejumlah pribadi berikut di komunitas disabilitas yang penulis terlibat didalamnya, barangkali bisa menjadi ilustrasi atas hal ini:

Pada usia belasan Puan dinikahkan, tanpa pernah ditanya apakah hal itu juga menjadi keinginannya. Disabilitas mental yang dialaminya membuat orangtua Puan beranggapan bahwa dia tidak mampu dan tidak perlu mengambil keputusan sendiri atas hidupnya. Orangtua Puan memandang pernikahan akan membuat '*ngopeni* Puan' berpindah pada suaminya. Kemudian datanglah pembagian bantuan langsung tunai (BLT) bagi keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang difabel. Orangtua Puan menuntut suami Puan '*mengembalikan*' anak mereka, dengan alasan '*dia dapat BLT karena anak saya, tapi BLT-nya cuma habis buat mabuk-mabukan*'. Suami Puan bersikeras bahwa dia lebih berhak atas Puan dan BLT yang diterimanya, dengan alasan '*anak saja, dulu tidak mau ngopeni, sekarang setelah ada BLT mau diminta kembali*'. Maka setiap kali suami Puan tidak di rumah, Puan akan dikunci di dalam rumah karena khawatir orangtuanya tiba-tiba membawa Puan pulang.

Bujang mengalami *cerebral palsy*. Karena kondisinya ini, sejak kecil Bujang dikurung di kamar, 24 jam, setiap

harinya, di sepanjang usianya. Ruang kecil dan gelap itulah keseluruhan dunia Bujang, di situ dia makan, di situ dia buang air besar. Ketika petugas sosial datang menawarkan fisioterapi bagi Bujang (yang berarti untuk sementara Bujang mesti tinggal di panti tempat terapi diberikan), keluarganya menolak, dengan alasan kalau Bujang tak lagi tinggal di rumah, mereka khawatir BLT yang diterima setiap bulannya akan dihentikan.

Sama dengan Bujang, Dharma hidup dengan *cerebral palsy*. Mulai pukul 5 pagi hingga jam 3 sore setiap harinya dia akan ‘dikurung’ dalam kamarnya, karena antara jam-jam tersebut kedua orangtuanya harus bekerja sebagai buruh harian. *Cerebral palsy* yang dialami Dharma, membuatnya memerlukan bantuan orang lain untuk bisa melakukan aktivitas keseharian termasuk makan dan minum. Bagi Dharma, situasi ini berarti ada kalanya, dia harus menunggu bapak atau ibunya pulang baru dia bisa makan dan minum, kalau kebetulan sedang tidak ada sanak atau tetangga yang bisa ‘ditipti’ untuk ‘*ngungake*’ Dharma.

Suatu kali Sunyata, seorang pegiat advokasi disabilitas, menceritakan pengalaman hidup Gigih, tetangganya yang mengalami disabilitas, “bagaimana ya caranya bisa meyakinkan Gigih untuk mau ikut kegiatan di komunitas disabilitas. Dulu si Gigih itu ya biasa saja mau keluar-keluar rumah, tapi sejak ada orang-orang yang suka menjadikan dia *memedi*, *pet* dia *blas nggak* mau lagi keluar rumah. Gara-garanya kalau *pas* Gigih keluar rumah, terus ada anak-anak kecil yang lagi *didulang*, orangtua anak-anak itu suka *ngomong* begini, ‘ayo makannya dihabiskan, kalau *nggak* habis kamu nanti *digondol* Gigih *lho*, takut *nggak* sama Gigih?!’

Keempat penggalan pengalaman hidup di atas hanya sebagian kecil dari situasi-situasi serupa yang menjadi konteks keseharian warga masyarakat kita yang difabel. Kalau *lockdown* atau ‘di rumah saja’ adalah bagian dari normalitas baru yang kita harus menjadi terbiasa atasnya, bagi sebagian rekan dan saudara

kita yang difabel, 'di rumah saja' adalah sesuatu yang sejak sebelum pandemi datang, telah, sedang dan (bisa jadi) akan terus menjadi satu-satunya normalitas yang dikenal. Perjumpaan dengan situasi seperti inilah yang kadangkala memunculkan pertanyaan, 'sungguhkah masyarakat kita telah jauh dan sedang berubah dengan cepat?' Sebagai ilustrasi, pemerintah Indonesia sudah sejak tahun 2011 meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (konvensi internasional mengenai hak-hak warga difabel), namun dari ilustrasi pengalaman keseharian empat rekan di atas, bisa kita lihat betapa satu dekade seolah tidak membawa perubahan berarti bagi keseharian mereka.

Berangkat dari amatan semacam ini, penulis berpandangan bahwa selain menjadi pengingat tentang betapa masifnya perubahan yang sedang terjadi, pandemi ini juga menegaskan betapa lambatnya perubahan masyarakat kita untuk bisa menjadi lebih setara. Dalam hitungan bulan bahkan minggu kita bisa menyaksikan dan mengalami macam-macam bentuk inovasi teknologi digital. Di sisi lain, dalam hitungan dekade bahkan ratusan tahun, kita juga bisa melihat dan mengalami betapa usangnya dan tak banyak berubahnya persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi: diskriminasi berbasis ras, gender, kondisi fisik, dan keyakinan. Maka, kalau bagi sebagian dari kita, masa ini dialami sebagai periode yang penuh perubahan dalam skala eksponensial, bagi sebagian yang lain, tampaknya perubahan lebih banyak terjadi secara *snail-mential*.

Berpijak pada refleksi ini, penulis berpandangan bahwa pandemi ini bisa dilihat sebagai sebuah ajakan untuk mengingat bahwa *volatile, uncertain, complex* dan *ambiguous*, bukanlah satu-satunya versi VUCA yang menandai kualitas kehidupan kolektif kita di masa ini. Bagi sebagian dari kita, versi yang lebih

aktual dalam kesehariannya adalah VUCA dalam arti terus menerus menerima perlakuan ataupun pesan simbolik yang menempatkannya dalam posisi *vulnerable*, *unjustly treated*, *coercively marginalized* dan *atrociously discriminated*. Maka kalau sedemikian banyak perhatian dan energi dicurahkan untuk memikirkan bagaimana dunia pendidikan tinggi bisa merespon dengan lebih adaptif zaman yang serba *volatile*, *uncertain*, *complex* dan *ambiguous*; tidakkah perhatian dan energi yang sama juga diperlukan untuk terus menerus mengupayakan pendidikan tinggi yang berpihak pada mereka yang selama ini diposisikan sebagai yang *vulnerable*, *unjustly treated*, *coercively marginalized* dan *atrociously discriminated*?

Pandemi dan Teknikalisasi Persoalan

Selain menjadi pengingat atas persoalan-persoalan kolektif yang ada masyarakat kita, pandemi ini tampaknya juga bisa dilihat sebagai momentum untuk menelisik beragam upaya akademis yang sudah pernah kita lakukan. Sejauh mana ikhtiar-ikhtiar akademis yang ditujukan untuk merespon persoalan-persoalan tersebut, sungguh membawa dampak yang bermakna? Adakah kemungkinan bahwa upaya-upaya yang kita lakukan selama ini justru (secara tidak langsung dan tanpa kita niatkan) turut melanggengkan persoalan-persoalan kolektif tersebut? Menelaah pertanyaan ini, barangkali akan membantu kita mengenali hal-hal apa yang perlu dilakukan secara berbeda supaya ada lebih besar kemungkinan bahwa ikhtiar yang kita lakukan akan tepat sasaran.

Dalam analisisnya yang sangat piawai dan cermat atas program-program pengembangan masyarakat yang pernah dilakukan di Indonesia, antropolog Tania Li (2007) menunjukkan bagaimana negara ini tak pernah sepi dari beragam kehendak baik

untuk mengatasi berbagai persoalan kolektif yang terus melilit bangsa kita: kemiskinan, kekerasan. Mulai dari lembaga negara, institusi pendidikan hingga organisasi keagamaan; mulai dari masa kolonial hingga periode pemerintahan paska reformasi, selalu saja ada beragam upaya dan ikhtiar yang diniatkan untuk membangun tatanan dan kualitas kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Ironisnya, melalui amatannya yang jeli, Tania Li juga menunjukkan bagaimana dengan beragam upaya dan ikhtiar yang ada, negara kita *toh* seolah tidak beranjak dari persoalan-persoalannya. Persis disinilah Tania Li membangun pertanyaannya: mengapa dengan segala niatan baik yang ada, harapan tentang masyarakat yang adil dan sejahtera tak juga tiba?

Teknikalisasi persoalan menjadi jawaban yang ditawarkan Tania Li. Beragam upaya dan ikhtiar tersebut tidak membawa dampak yang bermakna, karena tidak pernah sungguh-sungguh menysasar akar dari persoalan-persoalan itu sendiri, yaitu tatanan kekuasaan yang darinya lahir ketimpangan, peminggiran dan perampasan. Persoalan-persoalan yang ada dilihat semata-mata sebagai problem teknis yang memerlukan intervensi-intervensi manajerial. Di masa kolonial misalnya, banyak program dan inisiatif dilakukan oleh pejabat kolonial atas nama ‘niatan baik’ (baca: politik etis) untuk mengupayakan kualitas kehidupan yang lebih menyejahterakan warga pribumi yang ‘masih primitif’: membangun rumah sakit, sekolah, mengajarkan pentingnya hidup higienis, memberantas wabah. Namun demikian, tak satupun ikhtiar tersebut yang ditujukan untuk mempertanyakan apalagi merubah tatanan kekuasaan kolonial yang karenanya warga pribumi secara sistemik dimiskinkan dan diprimitifkan.

Di masa Orde Baru, lakon yang sama berulang. Di masa ini, praktek-praktek eksploitatif yang terjadi di masyarakat kita,

seringkali justru direpresentasikan sebagai perwujudan kehendak baik dari para elit untuk menolong atau bahkan menyelamatkan mereka yang miskin dan terbelakang. Komersialisasi hutan yang merampas hak masyarakat adat atas tanah dan budayanya, dinarasikan sebagai pembangunan masyarakat tertinggal. Industrialisasi pertanian yang menghancurkan ekologi dan tradisi lokal dilaporkan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan. Melalui narasi dominan semacam ini, praktek-praktek opresif penguasa menjadi terabaikan dan justru seolah-olah problem utamanya terletak pada mereka yang dilabel sebagai yang terbelakang dan kurang terdidik. Alih-alih menyasar tatanan kekuasaan yang menjadi akar masalah, beragam program dan intervensi justru dirancang untuk mengelola mereka yang karena 'ketertinggalannya' dinilai menghambat (baca: melawan) logika pembangunan (Li, 2007).

Bertolak dari argumen Tania Li (2007), tampaknya kita bisa memaknai masa pandemi ini sebagai momentum untuk mencermati sejauh mana beragam tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, lebih merupakan konsekuensi dari kecenderungan kita untuk melakukan teknikalisis persoalan daripada sebagai sesuatu yang sepenuhnya diakibatkan oleh pandemi itu sendiri. Cara pandang kita pada persoalan ketidakpatuhan warga pada protokol kesehatan barangkali bisa menjadi contohnya. Ketika sejumlah pasar tradisional menjadi kluster penularan misalnya, ketidakpatuhan pedagang banyak disoroti sebagai penyebabnya. Di sisi lain, kegagalan pemerintah untuk menghadirkan fasilitas dan tata ruang publik yang memadai cenderung terabaikan (Pelupessy, Yulianto, Madyaningrum, 2020). Contoh lain adalah ketika pada salah satu rapat terbatas penanggulangan COVID 19, kepala negara menyampaikan bahwa

kurang pahamnya masyarakat, khususnya kelas bawah, tentang tata cara cuci tangan dan pemakaian masker yang benar, menjadi salah satu penyebab utama tidak bisa segera teratasinya wabah ini. Maka, menurut presiden, salah satu intervensi yang diperlukan adalah strategi sosialisasi yang bisa lebih efektif mengajari masyarakat cara cuci tangan dan penggunaan masker yang benar (Ihsanuddin, 2020). Dalam cara pandang seperti ini, tampaknya ketidaksiapan para pejabat publik untuk mengambil strategi dan langkah penanganan wabah yang sungguh berbasis data dan pengetahuan empirik, tidak masuk sebagai pihak atau bagian yang ‘perlu diedukasi’. Barangkali, inilah yang disebut oleh Giroux (2014) sebagai, ‘*the ongoing criminalization of social problems*’ (hal. 9).

Contoh di atas mengilustrasikan bagaimana teknikalisis persoalan justru menjauhkan perhatian kita dari akar masalahnya. Melalui refleksi ini, penulis tidak hendak mengatakan bahwa teknikalisis persoalan harus sepenuhnya dihindari. Poin refleksi penulis lebih pada perlunya kesediaan untuk selalu mempertanyakan sungguhkah teknikalisis persoalan merupakan bentuk telaah dan intervensi yang paling diperlukan untuk memahami atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Memakai contoh di atas misalnya, berhati-hati dengan teknikalisis persoalan barangkali akan mencegah kita untuk tidak semata-mata melihat perilaku ketidakpatuhan warga pada protokol kesehatan sebagai bentuk ‘keterbelakangan individual’ (e.g., susah diatur, *ngeyel*, *kampungan*, mentalitas bekas jajahan), tetapi lupa pada sejarah panjang tidak hadirnya aparatus negara untuk memastikan berjalannya tata kehidupan dan ruang publik yang beradab di masyarakat kita, yang karenanya orang tak lagi percaya pada perlunya keadaban kolektif.

Bagi penulis refleksi ini menegaskan dua hal. Pertama, pandemi ini barangkali bisa dimaknai sebagai undangan untuk melihat sejauh mana telaah dan intervensi akademis yang kita lakukan untuk merespon persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kita di masa pandemi ini, tidak terjebak dalam teknikalisis persoalan, yang karenanya kita justru abai pada faktor dan kondisi yang menjadi akar masalahnya? Kedua, pandemi ini juga barangkali menjadi kesempatan untuk mencermati sejauh mana kemampuan universitas kita untuk bisa beradaptasi pada situasi pandemi, memerlukan sesuatu yang lebih dari (sekedar) penyesuaian teknis?

2.

Pendidikan Tinggi Berkaca pada Pandemi

“Selaras dengan hakikat sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Sanata Dharma memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya tatanan masyarakat yang lebih manusiawi dan sejahtera”

(Mukadimah Statuta Universitas Sanata Dharma)

Dalam berbagai ulasan tentang pandemi (termasuk dalam tulisan ini), salah satu pesan berulang yang disampaikan adalah ajakan untuk memaknai pandemi sebagai momentum transformasi. Dalam seri pertama rangkaian webinar Sanata Dharma Berbagi, yang diselenggarakan dalam rangka merespon berbagai tantangan kolektif yang muncul di masa pandemi, Rm. Benedictus Hari Juliawan, S.J., bahkan menyampaikan “sangat konyol kalau setelah pandemi ini kita akan kembali ke *business as usual*.” Dalam konteks pendidikan tinggi, *unusualness* seperti apa yang mesti kita jadikan sebagai *the new usual* dan mengapa?

Berangkat dari tiga poin refleksi yang disampaikan di bagian pertama tulisan ini, penulis berpandangan bahwa sebagai sebuah momentum transformasi bagi dunia pendidikan tinggi, pandemi ini menegaskan dua hal, yaitu: 1) perlunya kesediaan untuk menjadikan keadilan dan kesetaraan sebagai orientasi etik yang

mengarahkan praksis keseharian kita, dan 2) komitmen pada praktek baik.

Keadilan dan Kesetaraan sebagai Orientasi Etik

Berbasis pada studi longitudinal lintas negara, para ahli kesehatan publik telah lama menunjukkan bukti-bukti tentang keterkaitan antara ketidakadilan dan ketidaksetaraan dengan beragam persoalan sosial, seperti pelanggaran kemiskinan, diskriminasi dan kekerasan, memburuknya kualitas kesehatan, fisik maupun psikis, dan kerentanan relasi, baik pada tataran personal ataupun kolektif (Ansell, 2017; Pickett & Wilkinson, 2010; Wilkinson & Pickett, 2009).

Salah satu penjelasan yang diajukan oleh studi-studi ini adalah bahwa terus menerus mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan, akan membuat individu baik secara personal maupun kolektif, merasa terancam, merasa tidak aman, kehilangan kepercayaan pada orang lain dan komunitasnya, dan menjadi enggan untuk membangun koneksi sosial yang bermakna (Wilkinson & Pickett, 2017). Akumulasi hal-hal inilah yang pada akhirnya berpotensi menjadi pemicu bagi munculnya berbagai persoalan di atas. Berangkat dari asumsi tersebut, studi-studi ini merekomendasikan bahwa dalam upaya untuk mengatasi beragam persoalan di atas, kita perlu untuk bukan hanya melihat masing-masing persoalan tersebut sebagai *an end in itself* dan mengatasinya secara terpisah (Ansell, 2017; Pickett & Wilkinson, 2010; Wilkinson & Pickett, 2009; Wilkinson & Pickett, 2017). Lebih dari itu, diperlukan pula intervensi yang ditujukan untuk mengkritisi dan merubah tatanan dan konteks makro yang

melahirkan dan melanggengkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang darinya berbagai persoalan tersebut muncul.

Berpijak pada argumen ini, penulis berpandangan bahwa dalam konteks pandemi ini kehendak baik Sanata Dharma untuk mewujudkan *“tatanan masyarakat yang lebih manusiawi dan sejahtera”* tampaknya tidak bisa tidak menuntut kesediaan untuk mengambil bagian dalam upaya-upaya mengkritisi dan merubah tatanan dan konteks sosial yang darinya bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan lahir dan dilanggengkan. Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran di kajian psikologi komunitas yang mengkritisi peran dan posisi pengetahuan sebagai alat kekuasaan dan penundukan (e.g., Prilleltensky & Nelson, 2002; Evans, Duckett, Lawthom & Kivell, 2017), secara khusus penulis berpandangan bahwa upaya kita untuk merubah tatanan dan konteks sosial yang tidak adil dan diskriminatif justru perlu dimulai dari kesediaan kita untuk mencermati sejauh mana cara kerja kita selama ini, entah melalui praktek pengajaran, penelitian maupun pengabdian, justru secara langsung ataupun tidak, turut mengukuhkan tatanan kehidupan yang tidak adil dan diskriminatif.

Penulis akan menggunakan pengalaman melakukan studi di area disabilitas sebagai contoh untuk sedikit mengelaborasi poin ini. Dalam kajian psikologi, persoalan disabilitas masih cenderung dilihat sebagai persoalan yang bersumber pada kondisi fisik atau mental individu-individu yang mengalaminya. Studi-studi psikologis atas disabilitas cenderung memposisikan kondisi fisik dan mental pada individu difabel sebagai suatu bentuk inferioritas yang karenanya mereka menjadi beresiko mengalami beragam isu psikologis seperti memiliki konsep diri yang kurang baik, tidak bisa menerima diri apa adanya dan bahkan depresi. Hal tersebut misalnya tercermin dalam judul-judul penelitian berikut,

“Kesejahteraan Psikologis pada Remaja Penyandang Cacat Fisik” (Siburian, 2013), “Konsep Diri pada Penyandang Cacat Fisik pasca Amputasi” (Anggraini, 2011); dan “Hubungan antara Penerimaan Diri dan Depresi pada Remaja Penyandang Cacat Fisik di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PRSD) Suryatama Bangil, Pasuruan” (Anggraini, 2007).

Dengan memposisikan disabilitas sebagai persoalan yang bersumber pada ‘inferioritas’ fisik dan mental dari individu-individu yang mengalaminya, maka intervensi-intervensi psikologis atas persoalan ini juga menjadi cenderung bersifat teknis dan lebih banyak difokuskan pada individu-individu difabel itu sendiri. Hal ini misalnya seperti tercermin dalam judul penelitian berikut, ‘Pelatihan manajemen perilaku kognitif terhadap penerimaan diri penyandang tuna daksa’ (Nugraha, 2012). Dengan kata lain, intervensi semacam ini memandang bahwa individu-individu yang difabel perlu ‘direhabilitasi mentalnya’ supaya bisa lebih sejahtera secara psikologis. Dengan cara pandang seperti ini, intervensi psikologi atas persoalan disabilitas beresiko untuk mengabaikan tatanan masyarakat yang diskriminatif yang menjadi akar masalah dari berbagai kesulitan dan persoalan yang dialami individu difabel. Dengan menitikberatkan perhatiannya pada mereka yang difabel, psikologi baik sebagai bidang keilmuan ataupun praksis bisa luput untuk mengupayakan intervensi-intervensi yang bertujuan mengkritisi atau merubah tatanan masyarakat yang melahirkan dan melanggar perlakuan tidak adil dan tidak setara pada orang-orang difabel (Goodley, 2012; Goodley & Lawthom, 2006; Madyaningrum, 2019).

Disinilah terlihat bagaimana cara kerja kita sebagai akademisi ataupun praktisi bisa secara tidak langsung justru turut mereproduksi sistem dan tatanan masyarakat yang tidak adil

dan tidak setara. Seandainya kesadaran tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan hadir dalam cara pandang psikologi atas persoalan disabilitas, mungkin rumusan program intervensi yang disusun akan menjadi berbeda. Alih-alih hanya berfokus pada berbagai intervensi yang ditujukan bagi mereka yang difabel, bisa jadi justru akan muncul program-program yang diprioritaskan untuk mempromosikan komitmen dan kemampuan kolektif dari berbagai pihak terkait (e.g., pengambil kebijakan dan keputusan, lembaga dan aktor publik seperti sekolah, rumah sakit, petugas pemerintahan, para guru) supaya lebih mau dan mampu menjadikan inklusifitas sebagai orientasi etik dan praksis kesehariannya.

Berangkat dari amatan dan refleksi semacam inilah, penulis berpandangan tentang perlunya meletakkan keadilan dan kesetaraan sebagai orientasi etik dalam cara kita memaknai dan menghidupi praksis keseharian di dunia pendidikan tinggi. Bukan hanya dalam orientasi pelayanan kita kepada masyarakat sebagaimana diilustrasikan dengan pengalaman dari area studi disabilitas di atas, tetapi juga dalam cara pendidikan tinggi sebagai sebuah organisasi mengelola dirinya. Kalau disepakati bahwa pandemi ini menegaskan krusialnya komitmen pada keadilan dan kesetaraan sebagai prediktor dari seberapa mampu atau tidak suatu komunitas atau lembaga dapat bertahan dalam terjerangan krisis, tidaklah berarti kita perlu menggunakan momentum ini sebagai kesempatan untuk menilik sejauh mana komitmen pada keadilan dan kesetaraan sungguh juga menjadi orientasi etis dan praxis dalam pengelolaan universitas kita sebagai sebuah lembaga, baik dalam sistem manajerialnya ataupun terlebih dalam cara kita membangun dan memelihara jejaring relasi sosial yang menjadikan universitas kita sebagai satu komunitas terbayang

(meminjam istilah '*imagined communities*' dari Indonesianis, Benedict Anderson, 2006).

Tentu akan menjadi sebuah hipokrisi, apabila dalam upaya kita mewujudkan tatanan masyarakat yang manusiawi dan sejahtera melalui berbagai iktiar akademis dan pelayanan kepada masyarakat, keberlangsungan kita sebagai sebuah lembaga dan komunitas, justru ditandai dengan dinormalkannya bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan sebagai bagian dari praksis dan relasi keseharian kita. Padahal, sebagaimana ditunjukkan dari analisa para epidemiolog sebagaimana telah disampaikan di atas (Ansell, 2017; Pickett & Wilkinson, 2010; Wilkinson & Pickett, 2009), komitmen pada keadilan dan kesetaraan merupakan determinan kunci dari keberlanjutan (*sustainability*) suatu organisasi dan penggerak penting bagi kesediaan para anggotanya untuk mau berkontribusi dan membangun koneksi sosial secara bermakna.

Komitmen pada Praktek Baik

Penulis memulai naskah ini dengan ajakan untuk melihat pandemi ini sebagai pengingat akan pentingnya penyelenggaraan kehidupan publik yang berorientasi pada kepastian akan terselenggaranya dan terjaminnya *common goods*. Sebagaimana diilustrasikan dalam data tentang negara-negara yang dipandang berhasil mengelola pandemi COVID 19, ketangguhan mereka menghadapi wabah ini, bukan semata-mata ditentukan oleh strategi dan langkah penanganan yang mereka ambil saat ini, melainkan jauh lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang sudah mereka lakukan selama berpuluh tahun sebelum pandemi ini terjadi. Bisa dikatakan, saat ini mereka memetik hasil dari komitmen pada *good practices* yang darinya terbangun tata kehidupan publik yang kokoh.

Berangkat dari refleksi ini, maka penulis berpandangan bahwa kerapuhan atau ketangguhan universitas kita sebagai sebuah lembaga dalam menghadapi situasi pandemi ini, ditentukan bukan hanya oleh kebijakan dan strategi yang diambil hari-hari ini. Lebih dari itu, ketangguhan ataupun kerapuhan kita di hadapan pandemi ini, merupakan konsekuensi dari apa yang selama ini menjadi orientasi dan praxis keseharian kita. Belajar dari situasi ini, barangkali pandemi ini bisa menjadi momentum untuk: pertama, menengok ke belakang dan mengenali (serta kemudian merubah) orientasi dan praxis keseharian semacam apa yang menyumbang kerapuhan kita sebagai lembaga. Kedua, merumuskan praktek-praktek baik semacam apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan lembaga kita di masa mendatang. Dengan demikian, beragam perubahan dan adaptasi yang mesti dilakukan di hari-hari ini, tampaknya perlu dilihat bukan hanya dalam kerangka ‘merespon situasi pandemi’, tetapi sebagai bagian dari upaya merumuskan model, pengalaman dan konteks pembelajaran yang di masa mendatang akan menentukan relevansi, signifikansi dan ketangguhan kita sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Cara pemaknaan semacam ini menegaskan pada kita bahwa berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi ini menuntut penyesuaian yang lebih mendasar dan kompleks daripada sekedar adaptasi teknis (e.g., penguasaan teknologi pembelajaran). Bukan berarti bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Bahkan kalau dilihat dalam kerangka komitmen pada praktek baik, kesediaan kita untuk menjadi familiar dengan beragam teknologi pembelajaran terbaru, barangkali justru harus dilihat sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan hadirnya model, pengalaman dan konteks pembelajaran yang relevan dan signifikan dengan

zamannya. Namun demikian, penting kiranya untuk meletakkan beragam perubahan dan adaptasi teknis tersebut dalam konteks yang lebih besar terkait dengan cara kita memaknai dan menghidupi tanggung jawab publik kita sebagai sebuah institusi pendidikan, dan sebagai seorang pendidik. Dengan kata lain, menjadikan pandemi sebagai momentum transformasi pendidikan tinggi tampaknya menuntut kesediaan kita untuk menengok apa yang menjadi orientasi pedagogis kita selama ini. Barangkali kutipan dari pedagog kenamaan Paulo Freire berikut bisa menjadi pengingat, mengapa untuk mewujudkan komitmen pada praktek baik diperlukan pemahaman mendasar tentang apa itu pendidikan dan pendidik, dan bukan melulu mengandalkan penyesuaian-penyesuain teknis:

[E]ducation has to do with formation and not with training, education goes beyond the mere transference of techniques. I see as dangerous the possibility of education collapsing into technique, of being transformed into mere technique, into a practice that loses sight of the question of dreaming, the question of beauty, the question of being, the question of ethics. That would be an education just for production, just for marketing (2014, hlm. 25)

3.

Pendidikan Tinggi sebagai Ruang Formasi dan Ikhtiar Etis

"I feel very sad when a teacher says to me, "I teach mathematics, my dream is mathematics." No, the dream cannot be just mathematics. I teach mathematics because I believe it is necessary for a society to have less discrimination. The main dream, the fundamental dream, is not mathematics. Mathematics is very important, but it has to be at the service of something. I want mathematics to work in favour of me, a human being." (Paulo Freire, 2014, hlm. 21)

Kalau disepakati bahwa pandemi ini merupakan momentum bagi kita untuk menengok ke belakang dan merefleksikan apa yang menjadi orientasi pedagogis kita selama ini, maka barangkali yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah: 'orientasi pedagogis semacam apa yang akan (semakin) membantu kita menghadirkan model, pengalaman dan konteks pembelajaran yang darinya komitmen pada keadilan dan kesetaraan menjadi jalan sekaligus tujuan?'

Persis, pertanyaan ini jugalah yang menjadi fokus perhatian dalam *World Development Report* dari Bank Dunia untuk tahun 2018 (The World Bank, 2018). Laporan ini menunjukkan bagaimana secara global akses pada pendidikan dasar telah menjadi jauh lebih baik. Dilaporkan misalnya angka partisipasi

pendidikan dasar di berbagai belahan dunia yang meningkat dari kisaran 40 – 60 persen di tahun 70-an menjadi mencapai hampir 100 persen dari total populasi anak-anak usia sekolah dasar di tahun 2010. Pemerataan akses pendidikan diyakini sebagai salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan ketidakadilan dan kesenjangan sosial-ekonomi, karena pendidikan dipandang bisa menjadi sarana mobilitas sosial. Namun demikian, laporan ini juga menunjukkan bagaimana seiring meningkatnya akses pada pendidikan, justru semakin lebar pula tingkat kesenjangan sosial-ekonomi yang ada di berbagai negara. Bertolak dari situasi ini, dalam analisisnya atas laporan Bank Dunia tersebut, Instance dan Paniagua (2019) menyimpulkan bahwa prioritas utama dunia pendidikan di masa kini hendaknya tidak lagi difokuskan pada soal pemerataan akses pendidikan. Hal yang dipandang harus menjadi prioritas di masa kini adalah bagaimana mengembangkan model-model pendidikan yang sungguh bisa membangun *‘a solid ethical, social and cultural foundation’* bagi para peserta didik (hlm. 11). Pada titik inilah, pandangan atas pendidikan sebagai sebuah proses dan ruang formasi dan bukan sekedar sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dan ketrampilan, menjadi penting untuk direnungkan.

Terkait dengan peran pendidikan sebagai ruang formasi etis, sosial dan kultural, lembaga dunia untuk pendidikan, UNESCO, secara eksplisit menyerukan agar dunia pendidikan paska pandemi semakin meletakkan solidaritas sebagai orientasi etis dan praksis. Dalam laporan berjudul *“Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action”* (International Commission on the Futures of Education, 2020), diharapkan bahwa dunia akademis dapat semakin ambil bagian dalam upaya mengembangkan dan memelihara, *“a revitalized global solidarity that has empathy and*

an appreciation of our common humanity at its core” (hlm. 6). Komitmen pada solidaritas diyakini sebagai titian utama untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan setara.

Belajar dari sejarah Sanata Dharma, khususnya dari pemikiran-pemikiran Driyarkara sebagai pendirinya, Sanata Dharma (bahkan ketika masih merupakan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) tampaknya tidak pernah diikhtiarkan semata-mata sebagai lembaga tempat pengetahuan dan ketrampilan dilatihkan (Baryadi, 2013; Driyarkara, 1980; Frieda, 2013; Laksana, 2013; Sudiarja, Subanar, Sunardi & sarkim, 2006). Sebagaimana tercermin dalam semboyannya, ‘memanusiakan manusia’, memaknai pendidikan sebagai sebuah proses dan ruang formasi kemanusiaan merupakan semangat dasar Sanata Dharma. Sejalan dengan pilar pokok ajaran sosial gereja, sebagaimana telah diulas dengan detail dalam disertasi Rm. P. Bambang Irawan, S.J., (2016), solidaritas dan kolaborasi telah dan selalu menjadi orientasi etis Sanata Dharma; yang kini semakin dipertegas melalui preferensi kerasulan apostolik dan komitmennya untuk berjalan bersama yang disingkirkan.

Dalam semangat tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Sanata Dharma tampaknya tidak pernah dilihat sebagai *‘an end in itself’* melainkan cenderung diletakkan dalam konteks *‘pendidikan dalam rangka’*. Pesan inilah yang secara berulang menjadi pokok refleksi dan dialog kita bersama tentang universitas ini, sebagaimana tercermin dalam gagasan-gagasan yang menjadi fokus permenungan di hari jadi universitas kita. Sekedar untuk menampilkan beberapa contoh, di tahun 2002 misalnya, Profesor Agustinus Supratiknya, mengajak kita merenungkan gagasan tentang *scholarship of engagement* sebagai model pendidikan tinggi yang responsif pada aneka problem masyarakat

(Supratiknya, 2002). Dua tahun kemudian, di hari jadi Sanata Dharma yang ke 49, St. Sunardi mengingatkan kita tentang tanggung jawab pendidikan tinggi untuk turut melahirkan kepemimpinan nasional yang berpijak pada intelektualitas, moralitas dan keberanian (Sunardi, 2004). Bahkan di tahun 2013, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahiran Driyarkara, Rm. Bagus Laksana, S.J., mengajak kita menelisik pandangan kemanusiaan Driyarkara yang semakin menegaskan betapa Sanata Dharma selalu dicita-citakan sebagai ruang formasi yang melampaui fungsi-fungsi instrumental pendidikan (Laksana, 2013). Pesan ini juga yang barangkali bisa kita tarik dari catatan almarhum Rm. Ardi Handojoseno, S.J., di tahun 2016 dan Rm. Benedictus Hari Juliawan, S.J., di tahun 2018, dimana keduanya mengajak kita untuk menyikapi transformasi digital di dunia pendidikan tinggi sebagai kesempatan untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru formasi kemanusiaan dan bukan melihatnya semata-mata dalam kerangka penguasaan teknologi (Handojoseno, 2016; Juliawan, 2018).

Mencermati catatan-catatan ini kiranya jelas terlihat orientasi etis dan pedagogis Sanata Dharma untuk meletakkan pendidikan tinggi sebagai ruang formasi yang darinya diharapkan hadir pribadi-pribadi yang memiliki '*a solid ethical, social and cultural foundation*'. Maka, bagi universitas kita, tampaknya pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi tentang 'orientasi pedagogis semacam apa yang perlu dikembangkan?' melainkan 'bagaimana memastikan bahwa praxis keseharian kita sungguh mencerminkan komitmen etis untuk menghadirkan model, pengalaman dan konteks pembelajaran yang meletakkan keadilan, kesetaraan dan keberpihakan pada yang disingkirkan sebagai jalan sekaligus tujuan?' Mencari tahu bagaimana para mahasiswa kita

melihat, mengalami dan merasakan komitmen etis tersebut dalam kesehariannya, barangkali bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba mengambil data secara sederhana dari para mahasiswa terkait bagaimana mereka mengalami slogan Sanata Dharma, 'cerdas dan humanis'. Kepada para mahasiswa di kelas-kelas yang penulis ampu semester ini, penulis menanyakan hal atau pengalaman seperti apa yang mereka rasakan sebagai perwujudan konkrit dari slogan cerdas dan humanis dan sebaliknya yang inkonsisten dengan slogan tersebut. Dari beragam tanggapan yang disampaikan, tema relasi dengan dosen dan sesama mahasiswa, serta observasi atas lingkungan keseharian di kampus menjadi tema yang paling menonjol, baik sebagai pengalaman yang dinilai paling mencerminkan ataupun sebaliknya, paling bertentangan dengan slogan cerdas dan humanis.

Dalam ungkapan-ungkapan seperti: *'mayoritas dosen pengertian pada mahasiswanya', 'banyak dosen menerapkan sisi humanis di lingkungan kampus', 'sikap para dosen yang bersahabat dan menomorsatukan wellbeing mahasiswa', atau 'adanya solidaritas dari kakak tingkat dan teman-teman sekelas', 'tidak membedakan mahasiswa berdasar ras, etnis, agama atau warna kulit, semua diperlakukan sama', 'menghargai perbedaan dan minim diskriminasi', 'tercipta rasa toleransi antar seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa', 'apresiasi pada keberagaman'* mahasiswa merasa menemukan pengalaman keseharian yang cerdas dan humanis.

Relasi dengan dosen dan sesama mahasiswa, serta lingkungan keseharian di kampus, juga menjadi fokus refleksi ketika para mahasiswa tersebut mengungkapkan apa yang mereka

rasa sebagai hal dan pengalaman yang tidak cerdas dan tidak humanis. Hal tersebut muncul dalam ungkapan-ungkapan seperti, *'ada dosen yang tidak bisa menerima kalau dikritisi mahasiswa'*, *'ada dosen mempermalukan mahasiswa di depan kelas'*, *'mahasiswa justru dimarahi ketika bertanya tentang nilai pada dosen'*, *'ada unsur nepotisme dalam kepanitaan mahasiswa'*, *'ada bullying antar mahasiswa'*, dan *'mahasiswa yang hanya mau bergaul dalam kelompok-kelompoknya'* atau bahkan *'kebersihan toilet yang jarang diperhatikan'*.

Apa yang menjadi ungkapan pengalaman puluhan mahasiswa di kelas-kelas yang penulis ampu tentu saja tidak bisa dipandang sebagai potret yang representatif dari ribuan mahasiswa Sanata Dharma. Kendati demikian, ungkapan-ungkapan pengalaman di atas tampaknya bisa dilihat sebagai pemantik untuk menyadari dan menyikapi betapa bermaknanya *'relasi dan konteks keseharian'* bagi para mahasiswa. Bagi penulis, setidaknya ada dua poin refleksi yang bisa ditarik dari ungkapan-ungkapan pengalaman tersebut. Pertama, pengalaman-pengalaman ini semakin menegaskan betapa krusialnya komitmen pada praktek baik dalam keseharian kita, karena melalui yang keseharian itulah (bagaimana mahasiswa diperlakukan, bagaimana kelas dikelola, dan bagaimana lingkungan kampus dipelihara), mahasiswa akan pertama-tama menyaksikan dan mengalami *'embodied manifestations'* dari nilai dan keutamaan terkait solidaritas serta komitmen pada keadilan dan kesetaraan. Dalam 65 tahun perjalanannya, ada rekam jejak yang panjang dari upaya Sanata Dharma terlibat mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini, sebagaimana tercermin dalam beragam program dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kalau dalam ungkapan-ungkapan pengalaman sejumlah mahasiswa di atas, ingatan akan kegiatan-kegiatan

semacam ini justru bukan menjadi hal pertama yang dicatat sebagai manifestasi dari semangat cerdas dan humanis, mungkin para mahasiswa ini sedang ingin mengatakan kepada penulis sebagai pengajar mereka, ‘jangan khotbahi kami tentang solidaritas, keadilan dan kesetaraan, kalau kita sendiri belum bisa saling memperlakukan dengan adil dan setara’ atau barangkali juga mereka sedang hendak mengatakan, ‘sungguhkah kita hendak mengubah dunia, kalau memastikan kebersihan toilet saja kita belum bisa’ Maka kiranya benar pandangan Paulo Freire tentang peran pendidikan sebagai ruang formasi solidaritas:

“to enable them [students] to become more than they were, to expand the knowledge they brought to the classroom, and to broaden their sense of community and solidarity beyond their family, village, neighbourhood, and even nation, ... never allow [ourselves] to forget the connection between the abstract and the everyday, the global and the local, the self and the other” (dalam Giroux, 2014, hlm. 8).

Kedua, bagi penulis, ungkapan-ungkapan pengalaman sejumlah mahasiswa di atas, menegaskan salah satu pekerjaan rumah yang menandai migrasi dunia pendidikan ke ruang-ruang digital. Kalau benar bahwa relasi antar pribadi yang otentik memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses formasi mahasiswa sebagai pribadi-pribadi yang ‘cerdas dan humanis’, bagaimana memastikan bahwa keterbatasan intimitas yang ada di ruang-ruang pembelajaran digital tidak mereduksi kesempatan kita untuk membangun dan mengalami koneksi antar pribadi yang memanusiakan?

4.

Penutup: Solidaritas yang Memerdekakan

“[P]endidikan manusia muda dalam masa yang sangat penting dari pertumbuhannya. Terutama dalam waktu itu proses pemasukan generasi muda ke dalam masyarakat dan pemasukan masyarakat ke dalam generasi muda harus dijalankan” (Driyarkara, 1980, hlm. 12)

Kalau disepakati bahwa pandemi ini menegaskan harapan pada pendidikan tinggi sebagai institusi publik untuk turut semakin mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan setara, maka penting kiranya untuk sungguh menempatkan solidaritas sebagai orientasi etis, pedagogis dan praksis keseharian kita. Persis pada titik inilah, pandangan Driyarkara bahwa pendidikan adalah ‘proses pemasukan generasi muda ke dalam masyarakat dan pemasukan masyarakat ke dalam generasi muda’ menjadi sangat relevan untuk direnungkan. Pemikiran Driyarkara ini menegaskan bahwa solidaritas mensyaratkan kesediaan dan kemampuan seseorang untuk melampaui kediriannya; untuk menghubungkan dan meletakkan dirinya dengan dan dalam konteks yang lebih besar: komunitasnya, masyarakatnya, bangsanya bahkan semestanya.

Diberlakukannya kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” (MBKM) memberi ruang dan keleluasaan yang semakin besar bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan praxis pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa semakin dapat

membangun koneksi yang bermakna dengan komunitas dan masyarakatnya. Dengan kata lain, kebijakan ini membuka lebih banyak kemungkinan bagi dikembangkannya model dan aktivitas pembelajaran yang darinya mahasiswa bisa mengasah komitmen pada solidaritas, keadilan dan kesetaraan. Kalau biasanya, aktivitas akademis dieksklusifkan bagi pengembangan intelektualitas, dan sisi ‘kehumanisan’ diandaikan lebih banyak dialami oleh para mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan non-akademis, kebijakan MBKM membuka kemungkinan bahwa aktivitas sosial kemasyarakatan yang ditekuni para mahasiswa justru menjadi bagian pokok dari proses dan capaian akademisnya.

Dalam dokumen panduan MBKM, disebutkan bahwa melalui kebijakan ini diharapkan terbuka lebih besar kesempatan untuk “melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada [di masyarakat] serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Bab II, 2.e., para. 2). Tentu hal yang ideal sekiranya para mahasiswa dan institusi kita bisa turut ambil bagian dalam upaya-upaya konkrit mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Hal tersebut sungguh akan menjadi perwujudan nyata dari pemikiran Driyarkara tentang “pemasukan generasi muda ke dalam masyarakat dan pemasukan masyarakat ke dalam generasi muda”.

Di sisi lain, belajar dari telaah kritis atas sejarah program pengembangan masyarakat di Indonesia (e.g., Li, 2007; Mrazek, 2006), kehendak baik untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada di masyarakat justru seringkali bisa berakhir sebagai proses ‘obyektifikasi’ masyarakat. Telaah-telaah ini membantu kita menyadari bahwa alih-alih mewujudkan solidaritas, upaya-upaya akademis memecahkan permasalahan-

permasalahan yang ada di masyarakat seringkali justru meletakkan pihak terkait semata-mata sebagai obyek kajian ataupun intervensi. Bertolak dari refleksi ini, maka kiranya penting untuk memastikan bahwa kita tidak turut mereproduksi praktek-praktek obyektifikasi dalam upaya kita terlibat menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Barangkali salah satu caranya adalah dengan memaknai keterlibatan kita di masyarakat justru sebagai kesempatan untuk pertama-tama mengenali dan menyadari keterbatasan asumsi, pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki, sebagaimana penulis belajar dari refleksi salah satu mahasiswa berikut.

Kutipan refleksi berikut ditulis oleh salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan analisis sosial, yang dikelola oleh sejumlah dosen psikologi sosial di fakultas psikologi. Setelah terlibat dalam kunjungan ke sebuah desa di pinggiran barat Yogyakarta, mahasiswa ini menulis demikian dalam refleksinya:

“Ayo Nak, bantu Bapak”

Anak kecil berusia sekitar 3 tahun membantu bapaknya membawa bambu-bambu yang sudah dipotong untuk bahan membangun rumah. Anak tersebut terlihat lihai menyusun potongan bambu dan mengumpulkannya menjadi satu. Anak seusianya biasanya bermain mobil-mobilan. Anak ini justru membantu bapaknya dan belajar langsung dari tangannya. Saya bertanya, apakah ini bisa disebut eksploitasi anak?

Melalui refleksinya tersebut, mahasiswa ini memang sama sekali tidak memiliki kontribusi langsung untuk memecahkan persoalan yang ada di desa tersebut. Namun demikian, melalui refleksi tersebut, bisa jadi mahasiswa ini justru tengah menunjukkan kemauan dan kemampuannya untuk membangun solidaritas. Dalam refleksi tersebut alih-alih meletakkan dirinya

sebagai '*problem solver*' bagi masyarakat, mahasiswa ini justru pertama-tama menempatkan dirinya sebagai '*murid*' di hadapan '*guru masyarakat*'. Perjumpaan tersebut justru dia maknai sebagai kesempatan untuk menyadari kegagapan atau bahkan keterasingan disiplin keilmuannya untuk sungguh bisa memahami dan mengalami apa yang ada di masyarakatnya.

Kesediaan semacam inilah yang tampaknya juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya kita mewujudkan semangat solidaritas (terlebih bersama mereka yang dikucilkan dan disingkirkan) tidak justru menjelma menjadi bentuk-bentuk obyektifikasi atau *exercises of superiority*. Dengan demikian kesediaan kita untuk melibatkan diri dalam dan bersama yang di-*liyan*-kan, bukanlah pertama-tama karena kita merasa bisa dan perlu menjadi '*problem solver*' untuk mereka, melainkan berangkat dari kesadaran bahwa 'kemerdekaan dan kemanusiaan saya' terikat dengan 'kemerdekaan dan kemanusiaan' sesama saya. Maka, perkenalkan penulis untuk mengakhiri refleksi ini dengan mengutip Lilla Watson, seorang pejuang hak-hak warga Aborigin di Australia. Tentang mewujudkan keberpihakan kepada mereka yang tertindas dan disingkirkan, Watson mengatakan, "*If you come here to help me, you are wasting your time. But if you have come because your liberation is bound up with mine, then let us work together*". Dirgahayu Sanata Dharma.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso books.
- Anggraini, A. (2007). *Hubungan antara Penerimaan Diri dan Depresi pada Remaja Penyandang Cacat Fisik di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PRSD) Suryatama Bangil, Pasuruan*. Skripsi. Program Studi Psikologi Universitas Negeri Malang.
- Anggraini, T. S. (2011). *Konsep Diri pada Penyandang Cacat Fisik pasca Amputasi di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta*. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ansell, D. A. (2017). *The Death Gap: How Inequality Kills*. Chicago: The university of Chicago Press.
- Baryadi, I. P. (Ed). (2013). *Membaca Ulang Pemikiran Driyarkara*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). "What a Difference a Word Makes: Understanding Threats to Performance in a VUCA world". *Business Horizons*, 57(3), 311-317.
- Burström, B., & Tao, W. (2020). "Social Determinants of Health and Inequalities in COVID-19". *The European Journal of Public Health*, 30(4), 617-618.

- Bremmer, I. (2020, June). "The Best Global Responses to COVID-19 Pandemic". *Time*. Diakses dari <https://time.com/5851633/best-global-responses-covid-19/>.
- Britton, N. R. (1986). "Developing an Understanding of Disaster". *The Australian and New Zealand Journal of Sociology*, 22(2), 254-271.
- Cénat, J. M., Dalexis, R. D., Kokou-Kpolou, C. K., Mukunzi, J. N., & Rousseau, C. (2020). "Social Inequalities and Collateral Damages of the COVID-19 Pandemic: When Basic Needs Challenge Mental Health Care". *International Journal of Public Health*, 65(6), 717-718.
- Driyarkara (1980). *Driyarkara tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Evans, S. D., Duckett, P., Lawthom, R., & Kivell, N. (2017). Positioning the Critical in Community Psychology. In M. A. Bond, I. Serrano-García, C. B. Keys, & M. Shinn (Eds.), *APA Handbook of Community Psychology: Theoretical Foundations, Core Concepts, and Emerging Challenges, Vol. 1* (pp. 107-127). Washington: American Psychological Association.
- Freire, P. (2014). *Pedagogy of Solidarity*. Dalam Freire, P., Freire, A.M.A., & Oliveira, W. *Pedagogy of Solidarity* (hlm. 15-34.). London: Routledge.
- Frieda, T. (2013). *Driyarkara si Jenthu: Napak Tilas Filsuf Pendidik* (1913 – 1967). Jakarta: Kompas
- Giroux, H. (2014). "Memory's hope: In the Shadow of Paulo Freire's Presence". Dalam Freire, P., Freire, A.M.A., &

- Oliveira, W. *Pedagogy of solidarity* (hlm. 7-12.). London: Routledge
- Goodley, D. (2012). "The Psychology of Disability". Dalam N. Watson, A. Roulstone, & C. Thomas (Eds.), *Routledge Handbook of Disability Studies* (pp. 310 - 323). Oxon: Routledge. Diakses dari <http://ebookcentral.proquest.com/lib/vu/reader.action?docID=957292&ppg=1>.
- Goodley, D., & Lawthom, R. (Eds.). (2006). *Disability and Psychology: Critical Introductions and Reflections*. New York: Palgrave Macmillan.
- Handojoseno, A. M. A. (2013). *Aku Terkoneksi Maka Aku Ada: Perspektif Pedagogi Berbasis Koneksi di Era Digital*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ihsanuddin (2020, Agustus). "Jokowi Ingin Kalangan Menengah Atas Merasa Aman Beraktivitas di Luar Rumah". *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/17085621/jokowi-ingin-kalangan-menengah-atas-merasa-aman-beraktivitas-di-luar-rumah>
- Istance, D., & Paniagua, A. (2019). *Learning to leapfrog: Innovative pedagogies to transform education*. Center for Universal Education at The Brookings Institution. Diakses dari <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED602937.pdf>
- International Commission on the Futures of Education. (2020). *Education in a post-COVID World: Nine Ideas for Public Action*. Paris: UNESCO. Diakses dari https://en.unesco.org/sites/default/files/education_in_a_post-covid_world-nine_ideas_for_public_action.pdf

- International Labour Organisation (2020). *COVID-19 and the World of Work. Third edition Updated estimates and analysis*. Diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/dgreports/-/dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
- Irawan, P. B. (2016). *Bearing Together the Weight of Reality: The Mission of a Jesuit University in Nurturing an Ethic of Collaboration for the Common Good in Post Authoritarian Indonesia*. Doctoral dissertation. Boston College. School of Theology and Ministry.
- Juliawan, B. H. (2018). *Siapakah Manusia di Hadapan Revolusi Industry 4.0? Kecerdasan Buatan dan Konsekuensinya Bagi Dunia Kerja dan Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Diakses dari <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2020). *Kajian Dinamika Perubahan di dalam Rumah Tangga Selama COVID 19 di 34 Provinsi di Indonesia*. Diakses dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Kerjasama%20KP%20dan%20Kominfo/2020%20Siaran%20Pers%20Pernyataan%20Misoginis%20Pejabat%20Publik%20\(39%20Mei%202020\)/Eksekutif%20Summary%20KAJIAN%20DINAMIKA%20PERUBAHAN%20DI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA_03062020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Kerjasama%20KP%20dan%20Kominfo/2020%20Siaran%20Pers%20Pernyataan%20Misoginis%20Pejabat%20Publik%20(39%20Mei%202020)/Eksekutif%20Summary%20KAJIAN%20DINAMIKA%20PERUBAHAN%20DI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA_03062020.pdf)

- Korsakova, T. V. (2019). Higher Education in VUCA-world: New Metaphor of University. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(2), 31-35.
- Laksana, A. B. (2013). *Manusia Tanpa Sekat: Inspirasi Driyarkara dan Tantangan Pendidikan Universitas dalam Dunia Serba Cair*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Li, T. M. (2007). *The will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice Of Politics*. Durham: Duke university Press.
- Madyaningrum, M. E. (2020). Melawan Diskriminasi dengan Studi Disabilitas Kritis. Dalam K. Pertiwi & H. Yulindrasari (Eds.). *Geliat Kritis dalam Penelitian Sosial: Catatan Para Peneliti*. (pp. 29 – 40). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marmot, M., & Allen, J. (2020). "COVID-19: Exposing and Amplifying Inequalities". *Journal of Epidemiology Community Health*, 74(9), 681-682.
- Mrazek, R. (2006). *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nugraha, A. D. (2012). *Pengaruh Pemberian Pelatihan Manajemen Perilaku Kognitif Terhadap Penerimaan Diri Penyandang Tuna Daksa Di BBRSD Surakarta*. Tesis. Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oxfam International (2014). *Even it up: Time to end extreme inequality*. Diakses dari https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-en.pdf.

- Oxfam (2018, October). *The Commitment to Reducing Inequality Index 2018: A Global Ranking of Governments Based on What They Are Doing to Tackle The Gap Between Rich And Poor*. Diakses dari <https://oxfamibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620553/rr-commitment-reducing-inequality-index-2018-091018-summ-en.pdf>
- Pelupeasy, D., Yulianto, J.E., & Madyaningrum, M.E. (2020, September). Bias kelas dalam diskursus pemerintah soal COVID-19. *The Conversation*. <https://theconversation.com/bias-kelas-dalam-diskursus-pemerintah-soal-covid-19-146022>
- Pickett, K., & Wilkinson, R. (2010). *The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone*. London: Penguin Books.
- Prilleltensky, I., & Nelson, G. (2002). *Doing Psychology Critically: Making a Difference in Diverse Settings*. New York: Macmillan International Higher Education.
- Read, S. (2020, October). "Billionaires See Fortunes Rise by 27% During the Pandemic". *BBC News*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/business-54446285>.
- Shiraishi, S. (1997). *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics*. Ithaca, NY: SEAP Publications.
- Siburian, G. T. M. (2013). *Kesejahteraan Psikologis pada Remaja Penyandang Cacat Fisik*. Skripsi. Prodi Psikologi Unika Soegijapranata.
- Sudiarja, A., Subanar, G. B., Sunardi, S., & Sarkim, T. (Eds.) (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir*

- yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, S. (2004). *Tahta Berkaki Tiga: Kepemimpinan Intelektual dan Moral Perguruan Tinggi.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Supratiknya, A. (2002). *Service Learning, Belajar dari Konteks Kehidupan Masyarakat: Paradigma Pembelajaran Berbasis Problem, Mempertemukan Jean Piaget dan Lev Vygotsky.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- The World Bank. (2018). *2018 World Development Report: Learning to Realize Education's Promise.* Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018>.
- Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). Income Inequality and Social Dysfunction. *Annual Review of Sociology*, 35, 493-511.
- Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2017). The Enemy Between Us: The Psychological and Social Costs of Inequality. *European Journal of Social Psychology*, 47(1), 11-24.
- World Bank national accounts data (2020). *GDP per capita (current US\$).* Diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>.

Tentang Penulis

Monica E. Madyaningrum, M. Psych., Ph.D. adalah pengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002. Pada tahun 2005, menerima beasiswa *Australian Development Scholarship* untuk menempuh pendidikan S2 di program Psikologi Komunitas, Victoria University, Australia. Pendidikan S2 tersebut diselesaikan di tahun 2007 dengan penghargaan *Outstanding Student in Community Psychology* dari *the Australian Psychological Society, College of Community Psychology*. Pada tahun 2013 menerima *Prime Minister Asia Australia Endeavour Award* untuk menempuh studi S3 di program Psikologi Komunitas, Victoria University, Australia yang diselesaikan pada tahun 2017.

Karya dan publikasi ilmiah di tahun 2020, meliputi diantaranya: *Psychology and Disability Activism in Indonesia: Disrupting normalised Patronizing Knowledge and Practices* (invited speaker). 8th biennial International Conference of Community Psychology: Fostering and Sustaining Solidarities. Melbourne, Australia. (2020, November 11 - 13); “Bias Kelas dalam Diskursus Pemerintah Soal COVID-19”. *The Conversation*. <https://theconversation.com/bias-kelas-dalam-diskursus-pemerintah-soal-covid-19-146022> (Bersama Pelupessy, D., Yulianto, J.E., (2020, September)); *Isu-isu Etis dalam Praktek dan Riset Psikologi di Masa Pandemic COVID 19* (pemateri webinar). Webinar

Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Yogyakarta, Yogyakarta. (2020, Agustus 7); “Epistemological Violence, Essentialization dan Tantangan Etik dalam Penelitian Psikologi Sosial”. *Jurnal Psikologi Sosial*. 18(2), 106-115. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.12>. (2020); & How can Community Psychologists Best Work Towards Gender Equality. In M. Reimer, S. M. Reich, S. D. Evans, G. Nelson & I. Prilleltensky (Eds.) *Community psychology: In pursuit of liberation and wellbeing*. (pp. 355 – 377). London, UK: Red Globe Press – Macmillan. (Bersama Gridley, H., Turner, C., Carolissen, R., & Van Wyk, S., (2020)).

Monica E. Madyaningrum

SOLIDARITAS YANG MEMERDEKAKAN

Refleksi Atas Peran dan Tantangan Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi

Tulisan ini hendak merefleksikan apa yang sedang menjadi pengalaman dan pergulatan kita bersama di masa pandemi ini, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Ada tiga gagasan pokok yang hendak dipaparkan dalam buku ini. Pertama, menggunakan perspektif psikologi komunitas, tulisan ini mencoba menelaah pandemi sebagai epitome dari persoalan yang lebih besar terkait keadilan, kesetaraan dan keberpihakan. Berangkat dari telaah ini, di bagian kedua dari naskah, penulis mencoba melihat bagaimana dunia pendidikan tinggi bisa berkaca dan belajar dari situasi pandemi saat ini. Dalam mendiskusikan berbagai kemungkinan pembelajaran yang bisa ditarik dari situasi ini, penulis terutama akan mengaitkannya dengan tanggung jawab publik universitas dan perannya sebagai sebuah ruang formasi. Hal inilah yang menjadi poin diskusi utama di bagian ketiga dari tulisan ini. Terakhir, sebagai penutup, penulis akan merefleksikan ketiga gagasan ini dalam kaitannya dengan apa yang tengah menjadi konteks utama dunia pendidikan tinggi di negara kita, khususnya terkait wacana kampus merdeka, merdeka belajar. Kemerdekaan dalam buku ini lebih dilihat sebagai kesempatan dan kehendak untuk terus mengolah cara kita memaknai dan menghidupi solidaritas, yang merupakan titian penting untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang semakin memanusiakan manusia. [PENGANTAR]



ISBN 978-623-7379-80-5



9 786237 379805

psikologi